



PERAN KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI DALAM MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA UKURAN PERUSAHAAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

¹ Muhammad Zaikin

¹ Jurusan Akuntansi, Universitas Halu Oleo

email: : muhammad.zaikin@uho.ac.id

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) has become an important part of a company's sustainability, especially for large companies that face stakeholder pressure and higher legitimacy demands. However, ownership structure can influence how companies respond to these demands. This study aims to examine the effect of company size on CSR and the role of concentrated ownership in moderating this relationship. The study uses an explanatory quantitative approach with secondary data from annual reports and sustainability reports of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2018–2023 period. The sample consists of 27 companies with 162 firm-year observations selected using purposive sampling. CSR is measured using the Corporate Social Responsibility Disclosure Index based on GRI Standards, company size is measured using the natural logarithm of total assets, and concentrated ownership is measured based on the percentage of the largest shareholding. The analysis was conducted using panel data regression with STATA 17 through the Fixed Effect Model and robust standard error. The results show that company size has a positive and significant effect on CSR. However, concentrated ownership does not moderate the relationship between company size and CSR. These findings indicate that CSR is more related to the scale of the company and stakeholder pressure than to the level of ownership concentration.

Keyword: Corporate Social Responsibility; Firm Size; Concentrated Ownership; Sustainability Disclosure

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi bagian penting dalam keberlanjutan perusahaan, khususnya bagi perusahaan besar yang menghadapi tekanan stakeholder dan tuntutan legitimasi yang lebih tinggi. Namun, struktur kepemilikan dapat memengaruhi respons perusahaan terhadap tuntutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap CSR serta peran kepemilikan terkonsentrasi dalam memoderasi hubungan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data sekunder berupa laporan tahunan dan sustainability report perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2023. Sampel terdiri atas 27 perusahaan dengan 162 observasi firm-year yang dipilih menggunakan purposive sampling. CSR diukur menggunakan Corporate Social Responsibility Disclosure Index berdasarkan GRI Standards, ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural total aset, sedangkan kepemilikan terkonsentrasi diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham terbesar. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan STATA 17 melalui Fixed Effect Model dan robust standard error. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSR. Namun, kepemilikan terkonsentrasi tidak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan CSR. Temuan ini menunjukkan bahwa CSR lebih berkaitan dengan skala perusahaan dan tekanan stakeholder daripada tingkat konsentrasi kepemilikan.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Ukuran Perusahaan; Kepemilikan Terkonsentrasi; Pengungkapan CSR

1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi elemen penting dalam strategi bisnis berkelanjutan (Coelho et al., 2023). Perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga dituntut untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial guna memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan (Carroll, 1991; Jiang et al., 2022). Strategi CSR mencerminkan komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan sehari-hari (Padungsaksawasdi & Treepongkaruna, 2024).

Corporate Social Responsibility (CSR) telah bergeser dari aktivitas sukarela menjadi isu strategis yang melekat pada tata kelola dan daya saing perusahaan. Secara global, praktik pelaporan keberlanjutan sudah menjadi “business as usual”: survei KPMG (2024) terhadap 5.800 perusahaan di 58 negara menunjukkan 96% perusahaan G250 dan 79% perusahaan N100 telah melaporkan informasi keberlanjutan. Masih dalam survei yang sama, 95% perusahaan G250 telah mempublikasikan target karbon, menandakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan kini terhubung langsung dengan strategi bisnis, akses pembiayaan, dan ekspektasi investor. Kondisi ini menunjukkan bahwa CSR tidak lagi dipandang sebagai biaya tambahan semata, melainkan sebagai instrumen legitimasi, pengelolaan risiko, dan penciptaan nilai jangka panjang.

Penguatan praktik CSR juga terlihat dari standar pelaporannya. GRI menyebut bahwa pada 2024, 71% perusahaan N100 dan 77% perusahaan G250 menggunakan GRI Standards, sementara 54% perusahaan N100 dan 69% perusahaan G250 telah memperoleh assurance independen atas laporan keberlanjutannya. Ini penting karena semakin tinggi penggunaan standar dan assurance, semakin besar tekanan bagi perusahaan untuk mengungkapkan CSR secara lebih sistematis, terukur, dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, penelitian tentang faktor-faktor yang menentukan kuat-lemahnya implementasi CSR menjadi semakin relevan, terutama pada perusahaan publik yang berada di bawah sorotan pasar.

Di Indonesia, urgensi topik ini juga semakin kuat. OJK melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021–2025 menegaskan bahwa laporan keberlanjutan merupakan bagian dari pembangunan ekosistem keuangan berkelanjutan, dan OJK juga merujuk pada POJK No. 51/POJK.03/2017 sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Dari sisi praktik, BEI pada November 2024 menyatakan bahwa 97% perusahaan tercatat telah menyampaikan sustainability report untuk

tahun fiskal 2023. Artinya, persoalan utama di Indonesia bukan lagi semata-mata “apakah perusahaan melapor”, tetapi semakin bergeser menjadi “faktor apa yang menjelaskan kualitas dan intensitas CSR antarperusahaan”.

Selain tekanan domestik, perkembangan global juga mendorong perusahaan Indonesia untuk menyesuaikan diri. IFRS Foundation melaporkan bahwa lebih dari 20 yurisdiksi telah mengambil langkah untuk menggunakan atau mengadopsi standar ISSB, dan yurisdiksi-jurisdiksi tersebut merepresentasikan hampir 55% PDB global, lebih dari 40% kapitalisasi pasar global, dan lebih dari separuh emisi gas rumah kaca global. Dalam daftar snapshot IFRS Foundation, Indonesia sudah termasuk yurisdiksi yang telah mengambil langkah menuju penggunaan standar tersebut, meskipun pendekatannya masih terus berkembang. Perkembangan ini memperjelas bahwa perusahaan-perusahaan besar Indonesia akan menghadapi tuntutan pelaporan keberlanjutan yang semakin terintegrasi dengan pasar modal global.

Dalam literatur, ukuran perusahaan merupakan salah satu determinan CSR yang paling konsisten. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya finansial, kapasitas manajerial, visibilitas publik, dan eksposur reputasi yang lebih tinggi sehingga lebih terdorong untuk melakukan dan mengungkapkan CSR. Temuan Ting (2021), misalnya, menunjukkan bahwa pada perusahaan tercatat di Taiwan, firm size berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Temuan ini sejalan dengan logika teori legitimasi dan stakeholder: semakin besar perusahaan, semakin besar pula tekanan dari regulator, investor, media, dan masyarakat untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Karena itu, secara konseptual dapat diduga bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dengan CSR.

Namun, hubungan antara ukuran perusahaan dan CSR tidak selalu linier atau seragam. Ting (2021) juga menunjukkan bahwa walaupun perusahaan besar lebih banyak mengungkapkan CSR, manfaat ekonominya tidak selalu sama dengan perusahaan kecil; dengan kata lain, ukuran perusahaan dapat mengubah cara CSR dijalankan dan diterjemahkan ke dalam kinerja. Di titik inilah struktur kepemilikan menjadi penting. Perusahaan besar memang memiliki sumber daya lebih luas, tetapi keputusan untuk mengalokasikan sumber daya tersebut ke kegiatan CSR tetap sangat bergantung pada preferensi pemegang saham pengendali. Dengan demikian, ukuran perusahaan saja belum cukup untuk menjelaskan variasi CSR tanpa mempertimbangkan siapa yang sesungguhnya memegang kendali.

Kepemilikan terkonsentrasi merupakan mekanisme tata kelola yang dapat bekerja dua arah. Di satu sisi, konsentrasi kepemilikan dapat memperkuat pengawasan terhadap manajemen sehingga mendorong keputusan CSR yang lebih strategis dan berjangka panjang. Di sisi lain, dominasi pemegang saham

pengendali juga dapat membuat CSR diperlakukan secara selektif, terutama bila pemilik lebih berfokus pada efisiensi biaya atau manfaat privat. Dam dan Scholtens (2013), menggunakan hampir 700 perusahaan multinasional Eropa, menemukan bahwa semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, semakin lemah kebijakan CSR. Sebaliknya, studi terbaru di China menunjukkan bahwa ownership concentration berkorelasi positif dengan investasi CSR, yang berarti pengaruhnya sangat kontekstual dan belum final. Perbedaan hasil ini justru menegaskan adanya ruang penelitian lebih lanjut.

Bukti yang lebih baru juga menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memang memengaruhi praktik ESG/CSR secara nyata. Studi Villalonga, Tufano, dan Wang di *Journal of Corporate Finance* menganalisis 3.083 perusahaan dari 62 negara selama 18 tahun dan menemukan bahwa struktur serta identitas pemilik material berkaitan signifikan dengan kinerja ESG perusahaan. Dalam konteks Indonesia, studi di *Asian Journal of Accounting Research* pada 41 perusahaan periode 2018–2022 menemukan bahwa blockholder ownership berpengaruh negatif terhadap ESG performance, sedangkan foreign, government, dan institutional ownership cenderung berpengaruh positif. Temuan-temuan ini menguatkan argumen bahwa kepemilikan terkonsentrasi bukan sekadar variabel kontrol, tetapi layak diposisikan sebagai variabel penjelas utama, bahkan sebagai pemoderasi.

Fenomena lapangan Indonesia pada 2026 semakin mempertegas relevansi isu ini. BEI baru-baru ini mempublikasikan daftar 9 emiten dengan high shareholding concentration (HSC) berdasarkan struktur kepemilikan per 31 Maret 2026, dan sejumlah pemberitaan menyebut kategori ini terkait kepemilikan yang sangat dominan, bahkan di atas 95% pada beberapa kasus. Langkah BEI tersebut dilakukan demi transparansi pasar dan menjadi sinyal bahwa konsentrasi kepemilikan kini dipandang sebagai isu material bagi investor, likuiditas, dan kualitas tata kelola. Bila kepemilikan yang sangat terpusat telah menjadi perhatian pasar modal, maka sangat logis untuk menguji apakah struktur seperti ini juga memengaruhi bagaimana perusahaan besar menjalankan CSR.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran kepemilikan terkonsentrasi dalam memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan CSR menjadi penting secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjelaskan mengapa perusahaan besar tidak selalu menunjukkan tingkat CSR yang sama, meskipun sama-sama memiliki sumber daya dan visibilitas tinggi. Secara praktis, hasil penelitian akan bermanfaat bagi investor, regulator, dan manajemen untuk memahami apakah dominasi pemegang saham pengendali memperkuat komitmen keberlanjutan atau justru membatasi alokasi sumber daya bagi CSR. Dengan kata lain, penelitian ini berangkat dari premis

bahwa ukuran perusahaan menciptakan kapasitas untuk CSR, tetapi kepemilikan terkonsentrasi menentukan apakah kapasitas tersebut benar-benar diwujudkan dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Sub Judul

Bagian Landasan Teori dan Hipotesis wajib disusun menggunakan jenis font Helvetica dengan ukuran 11 pt, spasi antarbaris sebesar 1.15, dan menggunakan perataan Rata Kiri-Kanan (Justify). Pada bagian ini, penulis diharuskan menyusun sub judul yang terstruktur untuk menguraikan teori-teori utama yang digunakan sebagai dasar penelitian, serta penjelasan mendalam mengenai variabel-variabel penelitian beserta indikator pengukurannya. Penjelasan tersebut harus mengalir secara logis hingga merumuskan Hipotesis Penelitian yang diajukan. Seluruh rujukan teori dan pengembangan hipotesis harus disajikan secara koheren untuk mendukung kerangka pemikiran yang dibangun dalam artikel ini.

Catatan: Setiap sub judul terdiri dari minimal 3 paragraf dan setiap paragraf terdiri lebih dari 2 kalimat. Jarak antara sub bagian adalah 1 Enter

Sub Judul 2

Pastikan setiap referensi yang disitasi di dalam teks artikel tercantum secara akurat pada Daftar Pustaka, dan sebaliknya, setiap entitas dalam Daftar Pustaka harus memiliki rujukan yang jelas di dalam badan artikel. Jarak antara bagian 2 dan bagian 3 adalah 2 Enter

3. METODE PENELITIAN

Bagian Metode Penelitian wajib disusun menggunakan jenis font Helvetica dengan ukuran 11 pt, spasi antarbaris sebesar 1.15, dan menggunakan perataan Rata Kiri-Kanan (Justify). Penulisan metode penelitian dilakukan dalam bentuk paragraf yang mengalir secara naratif tanpa menggunakan sub-bagian atau penomoran poin. Bagian ini harus menyajikan rangkuman komprehensif mengenai seluruh rangkaian metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari desain penelitian, teknik pengambilan sampel, hingga metode analisis data. Seluruh penjelasan tersebut wajib disusun secara ringkas dan padat, dengan batasan maksimal sebanyak 3 paragraf.

Catatan: Pastikan setiap paragraf terdiri lebih dari 2 kalimat. Jarak antara Bagian 3 dan bagian 4 adalah 2 enter.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Sub - Judul Hasil

Bagian Hasil wajib disusun menggunakan jenis font Helvetica dengan ukuran 11 pt, spasi antarbaris sebesar 1.15, dan menggunakan perataan Rata Kiri-Kanan (Justify). Penulisan pada bagian ini bersifat fleksibel, di mana penulis diperbolehkan menggunakan subjudul untuk mengorganisir temuan penelitian atau menyajikannya secara mengalir tanpa subjudul. Bagian ini harus memaparkan temuan utama penelitian secara jelas dan objektif, yang biasanya didukung oleh penyajian data dalam bentuk tabel atau gambar untuk memperkuat analisis.

Catatan : Pastikan setiap paragraf terdiri lebih dari 2 kalimat. Jarak antara Sub Judul adalah 1 enter. Jarak antara HASIL dan PEMBAHASAN adalah 1 enter.

PEMBAHASAN

Sub - Judul Pembahasan

Bagian pembahasan wajib disusun menggunakan jenis font Helvetica dengan ukuran 11 pt, spasi antarbaris sebesar 1.15, dan menggunakan perataan Rata Kiri-Kanan (Justify). Penulisan pada bagian ini bersifat fleksibel, di mana penulis diperbolehkan menggunakan subjudul untuk mengorganisir temuan penelitian atau menyajikannya secara mengalir tanpa subjudul. Bagian ini harus memaparkan temuan utama penelitian secara jelas dan objektif, yang biasanya didukung oleh penyajian data dalam bentuk tabel atau gambar untuk memperkuat analisis.

Catatan : Pastikan setiap paragraf terdiri lebih dari 2 kalimat. Jarak antara Sub Judul adalah 1 enter. Jarak antara Pembahasan dan Kesimpulan adalah 2 enter.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bagian Kesimpulan wajib disusun menggunakan jenis font Helvetica dengan ukuran 11 pt, spasi antarbaris sebesar 1.15, dan menggunakan perataan

Rata Kiri-Kanan (Justify). Penulisan bagian ini harus dilakukan dalam bentuk paragraf yang mengalir, dengan batasan maksimal sebanyak 3 paragraf. Isi kesimpulan harus menyajikan jawaban ringkas atas tujuan penelitian, temuan utama yang diperoleh, serta implikasi atau saran singkat bagi penelitian selanjutnya tanpa mengulang detail data statistik yang sudah dibahas di bagian hasil.

Catatan: Pastikan setiap paragraf terdiri lebih dari 2 kalimat. Jarak antara Kesimpulan dan Saran adalah 1 enter.

Saran

Bagian Saran wajib disusun menggunakan jenis font Helvetica dengan ukuran 11 pt, spasi antarbaris sebesar 1.15, dan menggunakan perataan Rata Kiri-Kanan (Justify). Penulisan bagian ini mengikuti ketentuan yang sama dengan bagian kesimpulan, yaitu ditulis dalam bentuk paragraf yang mengalir, namun dengan batasan yang lebih ringkas yaitu maksimal sebanyak 2 paragraf. Saran yang diajukan harus bersifat aplikatif dan relevan, baik yang ditujukan untuk praktisi terkait maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Catatan: Catatan: Pastikan setiap paragraf terdiri lebih dari 2 kalimat. Jarak antara Saran dan Daftar Pustaka adalah 2x enter.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, N.N., Mulyani, S., & Alfian, A. (2020). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Entitas Akuntansi (Konsep dan Aplikasi). Diakses dari <https://play.google.com/books/reader?id=XtjuDwAAQBAJ&pg=GBS.PA11>.